

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN KEBAKKRAMAT



**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
CAMAT KEBAKKRAMAT
TAHUN 2023**

Alamat : Jl.Solo-Sragen Kode Pos 57762
No.Telp.(0271) 646925 Fax. (0271) 646925
KEBAKKRAMAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sehingga Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Tahun 2023 telah disusun. Laporan Pelaksanaan Tugas Camat ini merupakan perwujudan tanggung jawab Camat dalam memenuhi Tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Kami menyadari bahwa masih adanya berbagai kekurangan dalam Laporan ini dan adanya Program Kerja yang belum sepenuhnya tercapai secara optimal, maka guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka kami mengharapkan adanya saran, masukan yang konstruktif guna peningkatan kinerja instansi Kecamatan Kebakkramat.

Selanjutnya kami berharap kiranya Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Kebakkramat Tahun 2023 yang kami susun ini bermanfaat dan berguna bagi instansi Kecamatan Kebakkramat dan berlebih lagi bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Kebakkramat.

Kebakkramat, Januari 2023
CAMAT KEBAKKRAMAT

JOKO SUTRISNO, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680305 199003 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Maksud dan tujuan.....	2
BAB II DESKRIPSI OPD.....	3
A. Tugas dan Fungsi.....	3
B. Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan.....	4
C. Standard Operating Procedure (SOP).....	4
D. Perda/Perbup yang berkaitan dengan pelaksanaa Program dan Kegiatan.....	5
E.Struktur Organisasi (Bagan SOTK).....	5
F.Kepegawaian.....	7
1. Daftar Pegawai SKPD.....	7
2. Daftar Pejabat Struktural SKPD yang terisi.....	8
3. Daftar Pejabat Struktural SKPD yang belum terisi.....	8
4. Daftar Pejabat Fungsional SKPD.....	9
5 .Daftar Pejabat Fungsional SKPD yang belum terisi.....	9
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	10
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	10
B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.....	10
C. Urusan Pilihan	10
D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.....	10
BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	11
A. Program Penunjang Urusan	11
B. Unsur Pemerintahan Wajib	16
C. Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar.....	
D. Unsur Pilihan.....	16
E. Unsur Pemerintahan Pendukung	16
F. Unsur Penunjang.....	16
G. Unsur Pengawasan	16
H. Unsur Kewilayahan	17
BAB V CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	24
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan.....	24
BAB VI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	25
A. Urusan Pendidikan.....	25
B. Bidang Urusan Kesehatan.....	25
C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	25
D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	25

I. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.....	25
J. Bidang Urusan Sosial.....	25
BAB VII INOVASI DAN PENGHARGAAN.....	26
1. Inovasi.....	26
2. Penghargaan.....	26
BAB VIII PENUTUP.....	27
1. Kesimpulan.....	27
2. Saran.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan juga dipandang sebagai Perangkat Daerah dari Kabupaten/ Kota dimana menjadi unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, dimana Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Selanjutnya Camat mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut dengan membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Camat.

Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut kami menyusun “Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2023” yang merupakan gambaran keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas dalam waktu satu tahun.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini adalah :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);

- b. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
- c. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Kebakkramat ini merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan SKPD yang di dasarkan pada Rencana Kerja Tahunan tahun 2023. Laporan Pelaksanaan Tugas ini untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan Kecamatan Kebakkramat yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

DESKRIPSI PERANGKAT DAERAH

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Camat Kebakkramat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
6. Membina dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat Kebakkramat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan, pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan

Program Nasional yang dilaksanakan Kecamatan Kebakkramat terdiri dari:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3. Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah

C. Standar Operating Procedure

Standar Operasioal prosedur (SOP) Kecamatan Kebakkramat terdiri dari 14 Jenis SOP, antara lain sebagaia berikut :

NO.	NAMA SOP	UNIT PENGAMPU SOP
1	Prosedur Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2	Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu	Kasi. Pelayanan Umum
3	Prosedur Administrasi Pengajuan KTP	Kasi. Tata Pemerintahan
4	Pelayanan Legalisasi/ rekomendasi pengantar ijin keramaian	Kasi Keamanan dan Ketertiban
5	Prosedur Layanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi surat-surat;	Kasi. Pelayanan Umum
6	Permohonan ijin penelitian.	Kasi Keamanan dan Ketertiban
7	Penyusunan Rencana Kerja;	Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
8	Penyusunan SPJ Keuangan;	Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
9	Penyusunan RKA dan DPA;	Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
10	Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
11	Permohonan Cuti PNS;	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
12	Penerbitan SKP PNS;	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
13	Permohonan Penerbitan Kartu Pegawai;	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
14	Permohonan Penerbitan Dokumen Kepegawaian (Pengajuan Pensiun, Kenaikan Pangkat dll)	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

D. Perda/Perbup yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kebakkramat sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

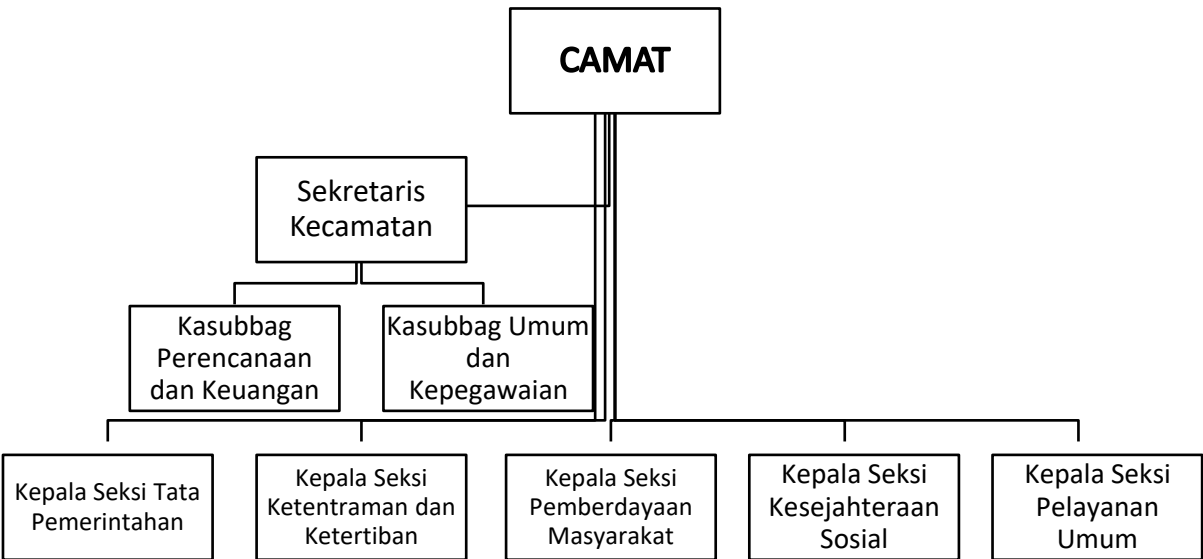
E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pemerintah Kecamatan Kebakkramat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Adapun jabatan struktural yang ada di Kecamatan Kebakkramat adalah :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Kecamatan
- 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- 6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 8. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- 9. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kebakkramat, sebagai berikut :



F. Kepegawaian

1. Daftar Pegawai Kecamatan Kebakkramat

NO	NAMA	NIP	STATUS KEPEG. (PNS/ CPNS)	PANGKAT/ GOLONGAN
1.	JOKO SUTRISNO, SH.,MM.	19680305 199003 1 010	PNS	Pembina Tk. I (IV/b)
2.	DESY PRAMUDAISTY,SE.,MM	19751217 200501 2 007	PNS	Pembina (IV/a)
3.	SUMARDI,SH,MT.	19710407 199203 1 004	PNS	Pembina (IV/a)
4.	SUGIYATO,S.Pd.,S.H.,M.Hum.	19661115 199303 1 010	PNS	Pembina (IV/a)
5.	ANI SUSILONINGSIH,SE,MM.	19630907 198802 1 001	PNS	Pembina (IV/a)
6.	RM ANDRIANTO BUDI UTOMO SE.Ak.,M.Si	19780826 200501 1 006	PNS	Pembina (VI/a)
7.	HENY SULISTYANINGSIH,S.Pd.,MM	19720205 199303 2 004	PNS	Pembina/(VI/a)
8.	MARDIYATI,S.Sos	19671124 199003 2 001	PNS	Penata Tk.I (III/d)
9.	NUR HAYATI, SE.	19720705 199602 2 001	PNS	Penata Tk.I (III/d)
10.	JOKO WALUYO	19780218 200801 1 013	PNS	Pengatur (II/c)
11.	DWI PRASETYO	19800928 200901 1 003	PNS	Pengatur Tk. I (II/d)

2. Daftar Pejabat Struktural Kecamatan Kebakkramat Yang Terisi

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANG KATAN
1	Joko Sutrisno, SH.,MM.	Camat	III	Memenuhi
2	Desy Prmaudsiasty,SE.,MM	Sekcam	III	Memenuhi
3	Sumardi,SH.MT.	Kasi Kesos	IV	Memenuhi
4	Heny Sulistyaningsih,SPd.,MM	Kasi Yanum	IV	Memenuhi
5	RM Andrianto Budiutomo,SE.Ak.,M.Si.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV	Memenuhi
6	Ani Susiloningsih,SE,MM.	Kasi Tapem	IV	Memenuhi
7	Sugiyato,S.Pd.,S.H.,M.Hum.	Kasi Trantib	IV	Memenuhi

8	Mardiyati,S.Sos.	Kasubag Umum & Kepegawaian	IV	Memenuhi
9	Nur Hayati,SE.	Kasubag Perencanaan & Keuangan	IV	Memenuhi

3. Daftar Pejabat Struktural Kecamatan Kebakkramat Yang Belum Terisi

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
1	NIHIL	

4. Daftar Jabatan Fungsional Umum (JFU) Kecamatan Kebakkramat

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
1.	Joko Waluyo	19780218 200801 1 013	Pengelola adminstrasi Pemerintahan
2.	Dwi Prasetyo	19880907 200901 1 003	Pengadministrasi Umum

5. Daftar Jabatan Fungsional Umum (JFU) Kecamatan Kebakkramat yang Belum Terisi

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)	JUMLAH
1	Penyusun Program Anggaran	1
2	Pengelola Data Pelayanan Umum	1
3	Pengelola Pada Kasi Kesejahteraan sosial	1
4	Pelaksana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1

BAB III**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH****A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR***Nihil***B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR***Nihil***C. URUSAN PILIHAN***Nihil***D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG***Nihil*

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 10.830.000,00 Realisasi: Rp. 10.830.000,00 Persentase: (100,00%)	Terseedianya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 10.830.000,00 Realisasi: Rp. 10.830.000,00 Persentase: (100,00%)	Terseedianya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Tersedianya Pemeliharaan	1 Paket (100.00%)		

				Lainnya Anggaran: Rp. 202.400.000,00 Realisasi: Rp. 201.398.673,00 Persentase: (99,51%)	rehabilitasi gedung kantor 1 Paket			
				4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 202.400.000,00 Realisasi: Rp. 201.398.673,00 Persentase: (99,51%)	Tersedianya Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor 1 Paket	1 Paket (100.00%)		
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran: Rp. 2.650.000,00 Realisasi: Rp. 2.650.000,00 Persentase: (100,00%)	Tercukupinya Alat Penyimpan 1 Buah	1 Buah (100.00%)		
			c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT	1) Pengadaan Mebel Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 5.000.000,00 Persentase:	Tercukupinya Mebel 1 Set	1 Set (100.00%)		

			A, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(100,00%)				
				2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 92.017.000,00 Realisasi: Rp. 84.903.000,00 Persentase: (92,27%)	Tersedianya Peratalan dan Mesin Lainnya 7 Buah	7 Buah (100.00%)		
			d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 1.920.000,00 Realisasi: Rp. 1.920.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 19.236.800,00 Realisasi:	Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		

				Rp. 19.236.800,00 Persentase: (100,00%)				
				3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 17.478.800,00 Realisasi: Rp. 15.540.300,00 Persentase: (88,91%)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
			e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 1.687.212.238,00 Realisasi: Rp. 1.456.431.932,00 Persentase: (86,32%)	Terbayarnya gaji Pegawai 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 1.687.212.238,00 Realisasi: Rp. 1.456.431.932,00 Persentase: (86,32%)	Terbayarnya gaji Pegawai 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
			f. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran:	Penyediaan Jasa Komunikasi	12 Bulan (100.00%)		

			MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 42.000.000,00 Realisasi: Rp. 39.151.488,00 Persentase: (93,22%)	sumber daya air dan 12 Bulan			
				2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 173.520.000,00 Realisasi: Rp. 173.520.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya jasa pelayanan Umum Kantor 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
			g. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 34.707.500,00 Realisasi: Rp. 33.400.000,00 Persentase: (96,23%)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pajak Kendaraan Dinas 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		

				2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 34.707.500,00 Realisasi: Rp. 33.400.000,00 Persentase: (96,23%)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pajak Kendaraan Dinas 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
			h. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 31.868.750,00 Realisasi: Rp. 31.798.950,00 Persentase: (99,78%)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Anggaran: Rp. 1.782.150,00 Realisasi: Rp. 1.782.150,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran:	Terselenggarany a Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan (100.00%)		

				Rp. 51.494.000,00 Realisasi: Rp. 51.088.000,00 Persentase: (99,21%)	SKPD 12 Bulan			
			i. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Anggaran: Rp. 4.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Tercukupinya Dokumen Pelaporan 16 Dokumen	16 Dokumen (100.00%)		

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Nihil

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

H. UNSUR KEWILAYAHAN

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	KECAMATAN		a. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Anggaran: Rp. 16.285.000,00 Realisasi: Rp. 14.669.000,00 Persentase: (90,08%)	Terpenuhinya Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa 12 Laporan , Terpenuhinya Kegiatan Tata Pemerintahan Desa 12 Laporan	Laporan , Laporan (%)		
			b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi: Rp. 3.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan, Kegiatan Percepatan	6 Laporan, 12 Bulan (100.00%)		

			Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Bulan			
			c. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Anggaran: Rp. 91.850.000,00 Realisasi: Rp. 89.575.000,00 Persentase: (97,52%)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Orang, Bulan (%)		

					Republik Indonesia 40 Orang, Terlaksananaya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 12 Bulan				
			d. PROGRAM P EMBERDAYA	1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga	Lembaga Kemasyara			

			AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Anggaran: Rp. 185.600.000,00 Realisasi: Rp. 184.941.500,00 Persentase: (99,65%)	Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarakatan, Tercukupinya Operasional Kegiatan PKK 1 Tahun	katan, Tahun (%)		
			e. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Anggaran: Rp. 6.070.000,00 Realisasi: Rp. 6.056.000,00 Persentase: (99,77%)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarakatan, Terlaksananya Kegiatan Musrenbang 1 Kegiatan	1 Lembaga Kemasyarakatan, 1 Kegiatan (100.00%)		
				2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Anggaran: Rp. 6.070.000,00 Realisasi: Rp. 6.056.000,00	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	1 Lembaga Kemasyarakatan, 1 Kegiatan (100.00%)		

				Persentase: (99,77%)	Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kema syarakatan, Terlaksananya Kegiatan Musrenbang 1 Kegiatan		
			f. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Koordinasi Upaya Penyel enggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 219.200.000,00 Realisasi: Rp. 217.920.000,00 Persentase: (99,42%)	Jasa Ketentraman dan Ketertiban 12 Bulan, Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan, Pembinaan Linmas dan Desa/ Wilayah 12 Bulan , Terpenuhinya operasional kegiatan sinergitas	12 Bulan, 12 Laporan, 12 Bulan , 12 Bulan (100.00%)	

					dengan kepolisian, RI, TNI dan instansi vertikal tingkat kecamatan 12 Bulan			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Nihil

J. UNSUR KEKHUSUSAN

Nihil

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DILAKSANAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Kement erian/ LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG

DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Bidang Urusan	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

N o	Kabupa ten	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

BAB VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR LAYANAN MINIMAL

1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM

No	Jenis	Indikator Kinerja Penerima			Mutu Minimal			Keterangan
		Indikator	Target	Batas	Indikator	Target	Batas	

3. Indeks Pencapaian (IP) SPM

BAB VII
INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
-----	--------------	-----------

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
-----	------------------	------------------------------

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan secara umum telah dapat berjalan sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dimana tugas pokok Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
2. Kecamatan Kebakkramat telah melaksanakan program dan kegiatan yang teralokasi pada DPA-SKPD dengan capaian 91,33% dan telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Untuk peningkatan bidang pelayanan masyarakat, sangat diperlukan peningkatan kualitas SDM secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan. Sehingga tingkat pemahaman serta pengetahuan perangkat kecamatan dapat mengikuti perkembangan baik dari segi peraturan yang harus diterapkan dan ketertiban administrasi birokrasi serta standar mutu pelayanan masyarakat.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023 ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa

Kebakkramat, Januari 2023
CAMAT KEBAKKRAMAT

JOKO SUTRISNO, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680305 199003 1 010